



**Determinan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)
Tahun 2015-2018**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
pada Universitas Negeri Semarang**

Oleh

Jihan Aqilah Rosyadah

NIM 7111416094

**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2020**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada :

Hari : Senin

Tanggal : 30 Maret 2020

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Dosen Pembimbing



Fafurida, S.E., M.Sc.

Prasetyo Aribowo, S.E., M.Si.

NIP. 198502162008122004

NIP.197902082006041002

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Senin
Tanggal : 30 Maret 2020

Penguji I



Dr. Amin Pujiati, S.E., M.Si.

NIP. 196908212006042001

Penguji II



Yozi Aulia Rahman, S.E., M.Sc.

NIP. 198701222014041001

Penguji III



Prasetyo Aribowo, S.E., M.Si.

NIP. 197902082006041002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi



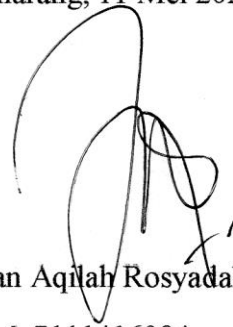
Drs. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D.

NIP. 196307181987021001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan juplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 11 Mei 2020



Jihan Aqilah Rosyadah

NIM. 7111416094

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

- “Selalu tampak tidak mungkin hingga selesai dikerjakan” (Nelson Mandela)
- “Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan dan apabila kamu telah selesai (dari urusan dunia), maka bersungguh-sungguhlah (dalam beribadah) dan hanya kepada Tuhanmulah berharap” (Q.S Al Baqarah : 152)

Persembahan

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan Hidayah-Nya, skripsi ini saya persembahkan kepada orang tua saya.

PRAKATA

Pada penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Drs. Heri Yanto, M.B.A, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang,
2. Fafurida S.E.,M.Sc., selaku ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang,
3. Prasetyo Aribowo, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing sekaligus dosen penguji ketiga,
4. Dr. Amin Pujiati, S.E, M.Si. selaku dosen penguji pertama, dan
5. Yozi Aulia Rahman, S.E., M.Sc. selaku dosen penguji ketiga.
6. Seluruh dosen Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmu kepada saya.

Harapan penulis semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak dan dapat menjadi acuan bagi penelitian yang lain dimasa yang akan datang.

Semarang, 11 Mei 2020

Penyusun

SARI

Rosyadah, Jihan Aqilah. 2020, “*Determinan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2015-2018*”. Sarjana Ekonomi Pembangunan FE Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Prasetyo Aribowo, S.E., M.Si.

Kata kunci : IPM, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Kepadatan Penduduk.

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan Provinsi dengan besaran IPM terendah ketiga dibandingkan dengan Provinsi lain di Indonesia, selain itu PDRB perkapita Provinsi NTT tahun 2015 hanya sebesar 14,9 juta rupiah perkapita yang mana merupakan Provinsi dengan perolehan paling kecil dibanding dengan seluruh Provinsi. Kepadatan penduduk di Kabupaten atau Kota Provinsi NTT juga masih belum merata. Masalah pendidikan juga menjadi masalah yang sangat kompleks di NTT, angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar disana masih kurang dari 100%, dan masih banyak perusahaan yang tidak membayarkan upah karyawan sesuai dengan penetapan upah minimum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten atau Kota Provinsi NTT.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Penelitian ini menggunakan gabungan antara data *time series* yaitu dari tahun 2015-2018 dan *cross section* 22 kabupaten atau kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Variabel yang digunakan adalah laju pertumbuhan ekonomi, kepadatan penduduk, APM, APK dan upah minimum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model estimasi regresi data panel yang sesuai adalah *Random Effect Model* (REM) yang menunjukkan nilai adjusted R^2 sebesar 0.8788. Variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap IPM adalah kepadatan penduduk (X2) dengan koefisien regresi sebesar 0.005, angka partisipasi murni (X3) dengan koefisien regresi sebesar 0.016 dan upah minimum (X5) dengan koefisien regresi 4.580.

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini yaitu : memberi bantuan bagi masyarakat golongan menengah bawah dan menyediakan pekerjaan yang layak, pemerintah juga diharapkan dapat membantu mendorong pertumbuhan jumlah penduduk agar dapat mencapai pemerataan dan meningkatkan perekonomian, Peneliti juga berharap bahwa pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan akses pendidikan yang layak bagi siswa dan diharapkan setiap tahunnya ada peningkatan upah di Kabupaten atau Kota Provinsi NTT.

ABSTRACT

Rosyadah, Jihan Aqilah. 2020, “*Determinant of Human Development Index (HDI) Nusa Tenggara Timur (NTT) Province*”. Final Project. Development Economics. Faculty of Economics. Universitas Negeri Semarang. Advisor Prasetyo Aribowo, S.E., M.Si.

Keywords : HDI, Rate of Economic Growth, Population Density.

One of main goals of Indonesia Nation, in the opening of the 1945 constitution is to increase the welfare of the nation, so, the government should realize the mandate contained in the 1945 constitution. Nusa Tenggara Timur (NTT) Province is the province with the third lowest HDI compared to all province in Indonesia, the GDP per capita of NTT Province in 2015 only amounted 14,9 million rupiah per capita which means it's so very low compared to other province in Indonesia. Population density in Regency or City of NTT Province also needs to be the focus of government attention because variations in population density there are still uneven. The problem education is also a very complex problem in there, the number of pure and crude participation there is still less than 100%. The provincial minimum wage in NTT if we compare with other provinces is still very far.

The data used in this research is secondary data, this research using multiple regression analysis. This study uses a combination of time series data from 2015-2018 and cross section 22 regencies or cities in Nusa Tenggara Timur (NTT). The variables used are rate of economic growth, population density, APM, APK and minimum wage.

The result showed that the corresponding panel data regression estimation model was the *Random Effect Model* (REM) which showed an adjusted R² valuee is 0.8788. variables that significantly effect on HDI are population density (X2) with a regression coefficient 0.005, pure participant rate (X3) with regression coefficient 0.016 and minimum wage (X5) with regression coefficient 4.580.

Suggestions that can be given based on the result of this study are : provide assistance to lower middle class community and provide decent work, government is also expected to help encourage population growth in order to achieve equity and improve the economy. Researchers also hope that local and central government can improve the quality of education and access to education that is appropriate for students and is expected to increase wages annually.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PRAKATA	vi
SARI	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	17
1.3. Cakupan Masalah	18
1.4. Perumusan Masalah	18
1.5. Tujuan Penelitian	19
1.6. Manfaat Penelitian	20
1.7. Orisinalitas Penelitian.....	20
BAB II KAJIAN PUSTAKA	22
2.1. Kajian Teori Utama (Grand Theory).....	22
2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia.	22
2.1.2. Teori Pertumbuhan Ekonomi	24

2.1.3. Penduduk.....	24
2.1.4. Pendidikan.....	25
2.1.5. Upah Pekerja.....	26
2.2. Kajian Variabel Penelitian	27
2.2.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia	27
2.2.2. Kepadatan Penduduk dan Indeks Pembangunan Manusia.....	28
2.2.3. Pendidikan dan Indeks Pembangunan Manusia.....	28
2.2.4. Upah Minimum Pekerja dan Indeks Pembangunan Manusia	29
2.3. Kajian Penelitian Terdahulu.....	29
2.4. Kerangka Berpikir.....	37
2.5. Hipotesis Penelitian.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1. Jenis dan Desain Penelitian.....	40
3.2. Operasional Variabel Penelitian.....	40
3.2.1. Variabel Terikat (Y)	40
3.2.2. Variabel Bebas (X)	41
3.3. Teknik Pengumpulan Data	42
3.4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	43
3.4.1. Spesifikasi Model Regresi	44
3.4.2. Pengujian Model Regresi	44
3.4.3. Uji Asumsi Klasik	46
3.4.4. Pengujian Statistik Analisis Regresi	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
4.1. Hasil Penelitian	50
4.1.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian	50

4.1.2. Gambaran Umum Variabel Penelitian	52
4.2. Hasil Analisis Data.....	52
4.2.1. Analisis Regresi Data Panel.....	58
4.2.2. Uji Asumsi Klasik.....	63
4.2.3. Uji Statistik Analisis Regresi	65
4.3. Pembahasan.....	70
4.3.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia.....	70
4.3.2. Kepadatan Penduduk Terhadap Indeks Pembangunan Manusia....	71
4.3.3. Angka Partisipasi Murni Terhadap Indeks Pembangunan Manusia	74
4.3.4. Angka Partisipasi Kasar Terhadap Indeks Pembangunan Manusia.....	75
4.3.5. Upah Minimum Terhadap Indeks Pembangunan Manusia.....	76
BAB V PENUTUP	79
5.1. Simpulan	79
5.2. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN.....	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia	3
Tabel 1.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi di Indonesia.....	4
Tabel 1.3 PDRB Per-Kapita Tahun 2015.....	5
Tabel 1.4 PDRB 3 Provinsi Tahun 2016-2018	7
Tabel 1.5 Upah Minimum Provinsi NTT, Papua Barat dan Papua.....	8
Tabel 1.6 Realisasi Belanja Pemerintah Daerah atau Provinsi	8
Tabel 1.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT tahun 2016-2018.....	9
Tabel 1.8 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten atau Kota NTT.....	11
Tabel 1.9 Kepadatan Penduduk di Kabupaten atau Kota NTT.....	12
Tabel 1.10 APM dan APK di Kabupaten atau Kota NTT.....	13
Tabel 1.11 Upah Minimum di Kabupaten atau Kota NTT	16
Tabel 4.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten atau Kota NTT.....	52
Tabel 4.3 Kepadatan Penduduk di Kabupaten atau Kota NTT	54
Tabel 4.4 APM di Kabupaten atau Kota NTT	54
Tabel 4.5 APK di Kabupaten atau Kota NTT	55
Tabel 4.6 Upah Minimum di Kabupaten atau Kota NTT	56
Tabel 4.7 Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten atau Kota NTT.....	58
Tabel 4.8 Hasil Estimasi Uji Chow.....	58
Tabel 4.9 Hasil Estimasi Hausman Test	59
Tabel 4.10 Hasil Estimasi Uji Lagrange Multiplier	61
Tabel 4.11 Uji Multikolinieritas.....	64
Tabel 4.12 Uji t (Signifikansi Parsial).....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis	38
Gambar 4.2 Uji Normalitas	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabulasi Data.....	85
Lampiran 2 Common Effect Model (CEM).....	89
Lampiran 3 Fixed Effect Model (FEM).....	90
Lampiran 4 Random Effect Model (REM).....	91
Lampiran 5 Likelihood Ratio – Uji Chow.....	92
Lampiran 6 Correlated Random Effects – Husman Test.....	93
Lampiran 7 Uji Lagrange Multiplier.....	95

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 terdapat tujuan utama bangsa Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai salah satu tujuan utama maka sudah seharusnya kebijakan dan seluruh kegiatan yang dirancang oleh pemerintah baik pemerintah daerah hingga pemerintah pusat memiliki tujuan mensejahterakan seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat merupakan sebuah inti dari suatu pembangunan nasional, tingkat kesejahteraan masyarakat mencerminkan kualitas hidup sebuah keluarga, keluarga dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi artinya mereka memiliki kualitas hidup yang baik dan begitu pula sebaliknya.

Proses pembangunan yang saat ini sedang dijalankan di Indonesia, peningkatan pertumbuhan ekonomi seringkali menjadi sasaran utama, hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi seringkali berkaitan dengan peningkatan barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut pemerintah sebagai pelaksana pembangunan tentunya memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat baik sebagai modal untuk menjalankan proses pembangunan. Peningkatan sumber daya manusia juga bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab negara Indonesia, hal ini pun sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yang ingin dicapai oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Seluruh negara tanpa

terkecuali berkewajiban untuk menggapai tujuan dan target dari SGDs, misalnya mengakhiri kemiskinan, mengakhiri kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan serta pendidikan yang bermutu. Negara Indonesia memiliki indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia di lihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)*.

IPM pertama kali diperkenalkan *United Nations Development Programme* (UNDP) tahun 1990, IPM dibentuk untuk mengukur kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara atau wilayah dalam pembangunan manusia. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Metode yang digunakan untuk menghitung IPM memerlukan 4 variabel dari 3 dimensi yaitu, Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH) sebagai cerminan dari dimensi kesehatan, Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebagai cerminan dimensi pendidikan, dan pengeluaran perkapita sebagai cerminan dari dimensi Standar Hidup Layak (SHL).

Menurut data Badan Pusat Statistika (BPS) pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami kemajuan. Bagi Indonesia, IPM juga digunakan sebagai data strategis untuk mengukur kinerja pemerintah dalam hal pembangunan manusia. Berikut ini disajikan tabel data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2015-2018 :

Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia Tahun 2015–2018

Tahun	IPM
2015	69.55
2016	70.18
2017	70.81
2018	71.39

Sumber : Badan Pusat Statistika (BPS), 2019

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Besaran ini dapat menandakan bahwa penduduk Indonesia mulai mengalami peningkatan kesejahteraan, dilihat dari data tersebut masyarakat mulai berhasil dalam mengakses hasil pembangunan pemerintah dibidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Ternyata disisi lain kenaikan IPM Indonesia ini masih terdapat provinsi yang memiliki kategori kesejahteraan menengah bawah. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa peningkatan kesejahteraan di Indonesia belum dirasakan oleh seluruh provinsi.

Berdasarkan konsep pembangunan manusia menurut Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia memiliki satu Provinsi yang masuk dalam kategori kesejahteraan tinggi dengan besaran IPM lebih dari 80,0, Provinsi tersebut merupakan DKI Jakarta. Indonesia saat ini didominasi oleh Provinsi yang memiliki kriteria kesejahteraan pada posisi menengah atas dengan rentang angka IPM antara 66,0 sampai dengan 79,9 dengan jumlah 29 Provinsi, jumlah itu terus meningkat setiap tahunnya diikuti dengan kenaikan angka IPM Nasional setiap tahunnya. Sementara itu, masih ada 4 Provinsi dengan kesejahteraan yang masuk dalam kategori menengah kebawah IPM antara 50,0 hingga 65,9 Provinsi itu adalah Provinsi Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua Barat dan

Papua. Berikut ini disajikan tabel data Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Provinsi di Indonesia tahun 2015-2018 :

Tabel 1.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2018

No	Provinsi	2015	2016	2017	2018
1	DKI Jakarta	78.99	79.6	80.06	80.47
2	Di Yogyakarta	77.59	78.38	78.89	79.53
3	Kalimantan Timur	74.17	74.59	75.12	75.83
4	Kepulauan Riau	73.75	73.99	74.45	74.84
5	Bali	73.27	73.65	74.3	74.77
6	Riau	70.84	71.2	71.79	72.44
7	Sulawesi Utara	70.39	71.05	71.66	72.20
8	Banten	70.27	70.96	71.42	71.95
9	Sumatera Barat	69.98	70.73	71.24	71.73
10	Jawa Barat	69.5	70.05	70.69	71.30
11	Aceh	69.45	70	70.6	71.19
12	Sumatera Utara	69.51	70	70.57	71.18
13	Jawa Tengah	69.49	69.98	70.52	71.12
14	Sulawesi Selatan	69.15	69.76	70.34	70.90
15	Jawa Timur	68.95	69.74	70.27	70.77
16	Kep. Bangka Belitung	69.05	69.55	69.99	70.67
17	Jambi	68.89	69.62	69.99	70.65
18	Bengkulu	68.59	69.33	69.95	70.64
19	Sulawesi Tenggara	68.75	69.31	69.86	70.61
20	Kalimantan Utara	68.76	69.2	69.84	70.56
21	Kalimantan Tengah	68.53	69.13	69.79	70.42
22	Kalimantan Selatan	68.38	69.05	69.65	70.17
23	Sumatera Selatan	67.46	68.24	68.86	69.39
24	Lampung	66.95	67.65	68.25	69.02
25	Sulawesi Tengah	66.76	67.47	68.11	68.88
26	Maluku	67.05	67.6	68.19	68.87
27	Maluku Utara	65.91	66.63	67.2	67.76
28	Gorontalo	65.86	66.29	67.01	67.71
29	Nusa Tenggara Barat	65.19	65.81	66.58	67.30
30	Kalimantan Barat	65.59	65.88	66.26	66.98
31	Sulawesi Barat	62.96	63.6	64.3	65.10
32	Nusa Tenggara Timur	62.67	63.13	63.73	64.39
33	Papua Barat	62.99	62.21	62.99	63.74
34	Papua	57.25	58.05	59.09	60.06

Sumber : Badan Pusat Statistika (2019), data diolah

Berdasarkan data 1.2 diketahui bahwa dari tahun 2015 hingga tahun 2018 3 Provinsi yaitu Nusa Tenggara Timur, Papua Barat dan juga Papua, memiliki besaran IPM terendah. 3 Provinsi ini mengalami peningkatan besaran IPM setiap tahunnya namun peningkatan ini tidak dapat menyamai besaran IPM Nasional yang setiap tahunnya juga terus meningkat.

Menurut data Badan Pusat Statistika (BPS) tahun 2015, Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan Provinsi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita hanya sebesar Rp 14,9 juta per kapita. Nominal tersebut merupakan yang paling kecil dari seluruh Provinsi di Indonesia. Selain itu, terdapat provinsi-provinsi lain yang memiliki nilai PDRB yang kecil dibandingkan dengan seluruh Provinsi yang ada di Indonesia, misalnya Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku merupakan Provinsi dalam kelompok empat provinsi dengan PDRB terkecil. Berikut ini disajikan tabel data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per-kapita 5 Provinsi tahun 2015 :

Tabel 1.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per-kapita Tahun 2015 (dalam juta rupiah)

Provinsi	PDRB
DKI Jakarta	195.4
Maluku	20.4
Maluku Utara	22.9
NTB	21.3
NTT	14.9

Sumber : Badan Pusat Statistika (2016), data diolah

Berdasarkan tabel 1.3 Provinsi NTT, Maluku, NTB dan Maluku Utara merupakan Provinsi dengan perolehan PDRB per-kapita terendah dibandingkan dengan Provinsi DKI Jakarta yang merupakan Provinsi dengan perolehan PDRB

tertinggi pada tahun 2015. Apabila dibandingkan dengan perolehan PDRB Provinsi DKI Jakarta dapat diketahui perolehan PDRB 4 Provinsi yaitu NTT, Maluku, NTB dan juga Maluku Utara merupakan Provinsi dengan angka PDRB per-kapita yang sangat kecil dan juga sangat jauh perbedaan perolehan angka ke-5 Provinsi tersebut. Hal ini pun terus menjadi fokus pemerintah bukan hanya meningkatkan PDRB diseluruh Provinsi di Indonesia namun juga meratakan ketimpangan yang terjadi di Indonesia. Karena baik dari segi kesehatan, pendidikan dan juga ekonomi masih sangat didominasi oleh Provinsi-Provinsi besar di Indonesia, namun juga masih banyak Daerah atau Provinsi yang mengalami ketertinggalan dalam bidang tersebut.

Tiga Provinsi yang memiliki besaran IPM terendah di Indonesia yaitu, Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua Barat dan Papua. Ketiga Provinsi ini memiliki karakteristik yang berbeda, luas wilayah Papua yaitu sebesar 319.036 km², sementara Papua Barat memiliki luas wilayah sebesar 140.376 km², lain halnya dengan Provinsi NTT yang hanya memiliki luas wilayah sebesar 47.246 km² artinya bahwa NTT merupakan Provinsi dengan luas wilayah yang paling sedikit dibanding Papua dan Papua Barat. Selain luas wilayah, perekonomian di ketiga Provinsi ini juga sangat berbeda, berikut ini disajikan tabel data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi NTT, Papua dan Papua Barat tahun 2016-2018 :

Tabel 1.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 3 Provinsi Tahun 2016-2018 (dalam triliun)

Provinsi	2015	2016	2017	2018
Nusa Tenggara Timur	76,19	84,17	91,16	99,09
Papua Barat	62,88	66,64	71,79	79,64
Papua	151,20	178,37	191,62	210,66

Sumber : Badan Pusat Statistika (2019), data diolah

Berdasarkan tabel 1.4 diatas dapat diketahui bahwa Provinsi Papua Barat memiliki angka PDRB yang lebih kecil dibandingkan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua, angka PDRB di ketiga Provinsi tersebut juga setiap tahun dari tahun 2015 hingga tahun 2018 terus mengalami peningkatan, terutama Provinsi Papua yang memiliki angka PDRB tertinggi dibanding dengan Provinsi NTT dan Papua Barat. Selain dari data PDRB tersebut, ketiga Provinsi ini juga memiliki Upah Minimum Provinsi (UMP) yang sangat berbeda. Menurut beberapa penelitian terdahulu, upah pekerja dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat karena upah merupakan suatu hak yang mereka terima setelah melaksanakan pekerjaan mereka, upah juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup para pekerja sehari-harinya.

Tambahan atau bonus juga dapat mempengaruhi kesejahteraan karena ketika upah yang mereka peroleh lebih daripada biasanya mereka bukan hanya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka tapi juga dapat memenuhi kebutuhan hidup lainnya, seperti kebutuhan sosial, dan kebutuhan lain di luar kebutuhan pokok. Berikut ini disajikan tabel data Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi NTT, Papua dan Papua Barat tahun 2015-2018 :

Tabel 1.5 Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi NTT, Papua Barat, dan Papua tahun 2015-2018

Provinsi	2015	2016	2017	2018
Nusa Tenggara Timur	1.250.000	1.425.000	1.525.000	1.660.000
Papua Barat	2.015.000	2.237.000	2.663.646	2.895.650
Papua	2.193.000	2.435.000	2.421.500	2.667.000

Sumber : Kementerian Ketenagakerjaan (2019), data diolah

Provinsi yang memiliki Upah Minimum Provinsi (UMP) lebih sedikit dibandingkan dengan 2 Provinsi lainnya adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), padahal dilihat berdasarkan data IPM 2 Provinsi yaitu Papua Barat dan Papua lebih rendah besarnya dibandingkan Provinsi NTT. Bahkan Provinsi Papua merupakan Provinsi nomer 2 setelah DKI Jakarta yang memiliki Upah Minimum Provinsi (UMP) tertinggi dibandingkan dengan Provinsi lain di Indonesia.

Penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah atau provinsi seringkali menjadi salah satu data untuk mengetahui apakah suatu daerah berhasil dalam mengembangkan potensi di daerahnya baik potensi alam dan manusianya. Berikut ini disajikan tabel data realisasi belanja pemerintah Daerah atau Provinsi di Provinsi NTT, Papua dan Papua Barat tahun 2015-2016 :

Tabel 1.6 Realisasi Belanja Pemerintah Daerah atau Provinsi NTT, Papua Barat dan Papua tahun 2015-2018 :

Provinsi	2015	2016	2017	2018
Nusa Tenggara Timur	3.328.496	3.898.591	4.663.190	4.968.984
Papua Barat	6.880.167	6.930.094	7.016.193	6.947.065
Papua	12.396.447	6.678.365	15.083.876	14.091.772

Sumber : Kementrian Keuangan (2019), data diolah

Periode tahun 2015 hingga tahun 2018 Provinsi NTT mengalami peningkatan nilai realisasi pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau provinsi namun, Provinsi Papua dan Papua Barat mengalami kecenderungan

peningkatan realisasi belanja Papua Barat mengalami penerunan belanja Pemerintah Daerah tahun 2017 dan Papua mengalami penurunan belanja pada tahun 2016. Sementara, dari ketiga Provinsi tersebut Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan Provinsi yang memiliki realisasi belanja pemerintah daerah paling sedikit dibandingkan dengan Provinsi Papua Barat dan Papua.

Karena alasan-alasan tersebut pada akhirnya penelitian ini akan fokus untuk menemukan faktor apa yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia, dengan Ibu kota yang berada di Kupang. Berikut ini disajikan tabel data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi NTT tahun 2015-2018 :

Tabel 1.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT Tahun 2015 – 2018

Tahun	IPM
2015	62.67
2016	63.13
2017	63.73
2018	64.39

Sumber : Badan Pusat Statistika (2019), data diolah

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nusa Tenggara Timur dari tahun 2015 hingga tahun 2018 terus meningkat, meningkatnya IPM Provinsi NTT setiap tahunnya dapat diartikan bahwa masyarakat NTT mulai mengalami peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup masyarakatnya. Walaupun IPM Nusa Tenggara Timur (NTT) selalu naik setiap tahunnya tapi besaran tersebut tidak dapat mencapai rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nasional yaitu 71.39 pada tahun 2018.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistika (BPS), periode tahun 2015 hingga tahun 2018 besaran IPM yang dimiliki Kabupaten atau Kota di Provinsi NTT setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, Kota Kupang merupakan Kota yang memiliki angka IPM tertinggi dibandingkan dengan seluruh Kabupaten atau Kota di Provinsi NTT. Kota Kupang merupakan ibukota dari Provinsi NTT sehingga akses kepada pemerintah Provinsi lebih dekat, sementara berdasarkan tabel 1.8 dapat diketahui bahwa perbedaan antar Kabupaten atau Kota di Provinsi NTT masih sangat tinggi. Sehingga, pemerintah Daerah dan pemerintah Provinsi perlu menentukan kebijakan sehingga kesejahteraan ini dapat dirasakan secara merata di seluruh Kabupaten atau Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menurut Badan Pusat Statistika (BPS) penduduk adalah seseorang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau bahkan lebih dan berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi memiliki tujuan untuk menetap. Pertumbuhan penduduk memiliki arti yaitu peningkatan sumberdaya atau potensi ekonomi karena penduduk merupakan salah satu dari faktor produksi. Bertambahnya jumlah penduduk maka Sumber Daya Manusia (SDM) akan bertambah yang dimaksudkan bahwa modal atau kekuatan dalam pembangunan suatu daerah atau wilayah akan bertambah pula (Suandi, *et al*, 2014). Sehingga pertumbuhan jumlah penduduk seringkali, dianggap sebagai suatu faktor pendorong perekonomian negara, namun perekonomian negara akan dapat maju apabila Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki mempunyai kualitas yang baik.

Berikut ini disajikan tabel data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten atau Kota di Provinsi NTT tahun 2015-2018 :

Tabel 1.8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten atau Kota di Provinsi NTT tahun 2015-2018

Kabupaten / Kota	2015	2016	2017	2018
Sumba Barat	61.36	61.85	62.3	62.91
Sumba Timur	62.54	63.22	64.19	64.65
Kupang	62.04	62.39	62.79	63.55
Timor Tengah Selatan	59.9	60.37	61.08	61.58
Timor Tengah Utara	60.96	61.54	62.03	62.65
Belu	60.54	61.04	61.44	61.86
Alor	58.5	58.99	59.61	60.14
Lembata	62.16	62.81	63.09	63.96
Flores Timur	61.24	61.9	62.89	63.55
Sikka	61.81	62.42	63.08	63.89
Ende	65.54	65.74	66.11	66.62
Ngada	65.1	65.61	66.47	67.1
Manggarai	60.87	61.67	62.24	63.32
Rote Ndao	58.32	59.28	60.51	61.51
Manggarai Barat	60.04	60.63	61.65	62.58
Sumba Tengah	57.91	58.52	59.39	60.07
Sumba Barat Daya	60.53	61.31	61.46	61.89
Nagekeo	63.33	63.93	64.74	65.35
Manggarai Timur	56.83	57.5	58.51	59.49
Sabu Raijua	53.28	54.16	55.22	55.79
Malaka	57.51	58.29	58.9	59.66
Kota Kupang	77.95	78.14	78.25	78.84

Sumber : Badan Pusat Statistika (2019)

Pada tahun 2015 hingga tahun 2018 di Kabupaten atau Kota Provinsi NTT mempunyai kecenderungan meningkatnya kepadatan penduduk per kilometer persegi, walaupun masih ada beberapa Kabupaten yang mana dari tahun 2017 ke 2018 tidak mengalami perubahan kepadatan penduduk, selain itu berdasarkan data tersebut juga dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 ke tahun 2016 terdapat beberapa Kabupaten yang justru mengalami pengurangan kepadatan penduduk. Menurut penelitian terdahulu dikatakan bahwa kesejahteraan penduduk

dipengaruhi oleh banyak faktor misalnya, pengeluaran rumah tangga, kebutuhan pangan, dan lain-lain.

Berikut ini disajikan tabel kepadatan penduduk di Kabupaten atau Kota Provinsi NTT tahun 2015-2018 :

Tabel 1.9 Kepadatan Penduduk di Kabupaten atau Kota Provinsi NTT Tahun 2015-2018 (jiwa/km²)

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018
Sumba Barat	165	168	171	173
Sumba Timur	35	36	36	36
Kupang	64	65	67	70
Timor Tengah Selatan	116	117	118	118
Timor Tengah Utara	92	93	94	94
Belu	161	168	171	174
Alor	70	69	69	70
Lembata	104	106	109	111
Flores Timur	136	142	143	145
Sikka	181	182	183	184
Ende	132	131	132	132
Ngada	95	91	92	94
Manggarai	189	169	172	174
Rote Ndao	115	120	124	129
Manggarai Barat	85	82	84	86
Sumba Tengah	47	38	39	39
Sumba Barat Daya	170	225	230	234
Nagekeo	98	100	101	102
Manggarai Timur	109	111	112	113
Sabu Raijua	186	193	199	205
Malaka	155	158	161	163
Kota Kupang	2432	2232	2289	2351
Nusa Tenggara Timur (NTT)	108	209	110	112

Sumber : Badan Pusat Statistika (2019)

Pentingnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan merupakan faktor penting untuk dapat meningkatkan kualitas seseorang, seseorang dengan tingkat pendidikan yang tinggi seringkali dianggap

lebih memiliki kualitas diri yang baik daripada seseorang dengan pendidikan rendah. Berikut ini disajikan tabel Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten atau Kota Provinsi NTT tahun 2018 :

Tabel 1.10 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten atau Kota Provinsi NTT Tahun 2018 (persen)

Kabupaten / Kota	APM	APK
Sumba Barat	74.41	76.61
Sumba Timur	71.79	74.2
Kupang	74.94	83.36
Timor Tengah Selatan	70.87	69.88
Timor Tengah Utara	73.52	78.75
Belu	70.9	66.78
Alor	71.89	70.05
Lembata	75.57	72.31
Flores Timur	72.8	71.47
Sikka	72.4	77.29
Ende	71.83	79.63
Ngada	79.33	70
Manggarai	72.45	80.68
Rote Ndao	72.9	76.24
Manggarai Barat	72.24	71.67
Sumba Tengah	71.53	73.48
Sumba Barat Daya	64.87	73.96
Nagekeo	74.42	70.55
Manggarai Timur	70.09	74.25
Sabu Raijua	81.01	79.63
Malaka	70.9	72.04
Kota Kupang	76.82	95.8

Sumber : Badan Pusat Statistika (2019), data diolah

Menurut BPS (2017) salah satu langkah untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan dapat dilakukan dengan cara mengikuti pendidikan sesuai dengan tingkatan dan usianya. Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan suatu ukuran dalam persen yang digunakan untuk melihat seberapa tepat anak-anak usia

sekolah masuk ke dalam lembaga pendidikan sesuai dengan usianya. Sementara, Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa berapapun usianya saat masuk sekolah dan sedang sekolah ditingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

Berdasarkan data dapat diketahui bahwa kabupaten atau kota di Provinsi NTT memiliki besaran APM dan APK yang tidak terlalu tinggi di setiap daerahnya, permasalahan yang melatarbelakangi adalah angka APM dan APK di Kabupaten atau Kota Provinsi di NTT belum mencapai 100% terlebih tahun 2018 menurut data Susenas ada sebanyak 111.040 anak yang mengalami putus sekolah, hal ini dikarenakan kesenjangan akses pendidikan antar daerah di NTT masih sangat tinggi.

Pendapatan merupakan indikator penting dimana seseorang dapat mengakses sumber daya yang tersedia, dengan pendapatan atau upah seseorang dapat membeli kebutuhannya dan juga dapat mencukupi konsumsi bagi dirinya. Menurut Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, pasal 41 ayat 2, menyebutkan bahwa :

“Upah minimum sebagaimana dimaksud merupakan upah bulanan yang terdiri atas : a. Upah tunjangan; atau b. Upah pokok termasuk tunjangan tetap.”

Pemerintah terus berupaya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja dengan meningkatkan upah minimum bagi para pekerja. Pada dasarnya penerapan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah ditentukan untuk mengurangi eksploitasi terhadap para buruh dan pekerja. Upah Minimum

Regional (UMR) merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap para pekerja.

Salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh para buruh atau pekerja ialah, seringkali masih banyak perusahaan yang tidak mengikuti penetapan Upah Minimum Regional (UMR). Sehingga, masih banyak para pekerja yang tidak mendapatkan upah yang sesuai dengan penetapan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Hal ini menyebabkan banyak seseorang yang tidak dapat memperoleh sumber daya yang tersedia karena kurangnya akses atau upah yang mereka miliki.

Upah minimum ini diberikan oleh para pemberi kerja dalam waktu sebulan sekali hal ini sebagai hak yang harus diterima oleh pekerja setelah melaksanakan kewajiban mereka yaitu bekerja. Menurut Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) masih banyak perusahaan di NTT yang membayar pekerjanya tidak sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR). Hal ini dikarenakan pengawasan penerapan upah minimum masih kurang di NTT sehingga masih banyak pula perusahaan yang tidak mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan tersebut. Berikut ini disajikan tabel data Upah Minimum di Kabupaten atau Kota Provinsi NTT tahun 2018 :

Tabel 1.11 Upah Minimum di Kabupaten atau Kota Provinsi NTT Tahun 2018 (dalam rupiah)

Kabupaten / Kota	Upah Minimum Regional
Sumba Barat	1.660.000
Sumba Timur	1.660.000
Kupang	1.660.000
Timor Tengah Selatan	1.660.000
Timor Tengah Utara	1.660.000
Belu	1.660.000
Alor	1.660.000
Lembata	1.660.000
Flores Timur	1.660.000
Sikka	1.660.000
Ende	1.660.000
Ngada	1.660.000
Manggarai	1.660.000
Rote Ndao	1.660.000
Manggarai Barat	1.660.000
Sumba Tengah	1.660.000
Sumba Barat Daya	1.660.000
Nagekeo	1.660.000
Manggarai Timur	1.660.000
Sabu Raijua	1.660.000
Malaka	1.660.000
Kota Kupang	1.712.000

Sumber : Badan Pusat Statistika (2018), data diolah

Berdasarkan data pada tabel 1.11 menunjukkan bahwa upah minimum Regional di Kabupaten atau Kota Povinsi NTT pada tahun 2018 memiliki besaran yang sama, namun perbedaannya terdapat pada upah minimum regional Kota Kupang yang pada periode tahun tersebut memiliki upah minimum jauh lebih besar dibandingkan dengan Kabupaten lainnya, yaitu sebesar 1.712.000.

Pada era desentralisasi seperti saat ini, adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom (Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2004), mengartikan bahwa pemerintah daerah diharapkan mampu menggali potensi daerah dan dapat memanfaatkan sumber daya yang ada di daerah tersebut untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah Daerah maupun Pusat memiliki peran yang sangat besar dalam hal alokasi, distribusi dan stabilisasi. Pemerintah daerah di era otonomi daerah memiliki kewenangan yang sangat besar sehingga pemerintah daerah harus mampu mengembangkan alokasi sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten atau Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagian besar memiliki pendapatan yang lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerahnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT memiliki pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Tentunya masih ada beberapa Kabupaten atau Kota di Provinsi NTT yang memiliki besaran pengeluaran pemerintah yang lebih besar dibandingkan dengan pendapatannya. Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Belu, Kabupaten Lembata, Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sumba Barat Daya. Selain itu Kabupaten atau Kota lainnya di Provinsi NTT dikatakan memiliki surplus anggaran karena pendapatannya lebih besar dibandingkan dengan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi masalah pada penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan masyarakat di

suatu wilayah. Nusa Tenggara Timur juga merupakan provinsi di Indonesia yang memiliki potensi untuk dapat berkembang dan maju dilihat dari besaran IPM provinsi ini juga memiliki kecenderungan meningkat setiap tahunnya, namun besaran ini selalu menjadikan NTT sebagai provinsi dengan IPM terendah ketiga dibandingkan dengan IPM provinsi lain yang ada di Indonesia.

1.3 Cakupan Masalah

Cakupan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai kesejahteraan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diukur menggunakan IPM dan juga penelitian ini dilakukan untuk mengetahui variabel apa saja yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten atau Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Penelitian ini hanya akan fokus pada beberapa variabel yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di NTT, seperti laju pertumbuhan ekonomi, kepadatan penduduk, Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Upah minimum pekerja, dalam kurun waktu 2015-2018.

1.4 Perumusan Masalah

Beberapa indikator yang ada pada latar belakang di atas menunjukkan bahwa NTT memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Berdasarkan data IPM Provinsi NTT setiap tahunnya mengalami kecenderungan meningkat. Nilai UMR provinsi NTT yang mengalami kenaikan sebesar 8% pada tahun 2019 juga membuktikan bahwa pemerintah daerah NTT meng-inginkan peningkatan kesejahteraan bagi para pekerja. Selain itu masalah pendidikan juga

merupakan masalah penting di NTT karena tingkat pendidikan di NTT masih sangat rendah. Pertanyaan pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana laju pertumbuhan ekonomi mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi NTT?
2. Bagaimana kepadatan penduduk mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi NTT?
3. Bagaimana Angka Partisipasi Murni (APM) mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi NTT?
4. Bagaimana Angka Partisipasi Kasar (APK) mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi NTT?
5. Bagaimana upah minimum mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi NTT?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Mengetahui dan menganalisis laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi NTT mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
2. Mengetahui dan menganalisis kepadatan penduduk di Kabupaten/Kota di Provinsi NTT mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
3. Mengetahui dan menganalisis Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten/Kota di Provinsi NTT mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

4. Mengetahui dan menganalisis Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten/Kota di Provinsi NTT mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
5. Mengetahui dan menganalisis upah minimum di setiap kabupaten atau kota di Provinsi NTT mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah provinsi, para pengambil kebijakan, maupun penulis. Manfaat tersebut antara lain:

1. Bagi Pemerintah Provinsi, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
2. Bagi para pengambil kebijakan, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan program apa dan kebijakan apa yang cocok untuk diterapkan di NTT, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
3. Bagi Peneliti, dari penelitian ini diharapkan peneliti mampu mendapatkan wawasan, keilmuan, pengetahuan dan juga keterampilan mengenai tingkat kesejahteraan atau IPM di Provinsi NTT.

1.7 Orisinilitas Penelitian

Orisinilitas penelitian ini dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya adalah perbedaan pada variabel yang akan digunakan dan juga periode tahun yang akan digunakan. Variabel yang akan digunakan pada penelitian ini adalah laju pertumbuhan ekonomi, kepadatan penduduk, Angka

Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan juga Upah minimum pekerja. Penelitian ini juga bermaksud menggabungkan 5 variabel bebas yang pada penelitian terdahulu belum pernah untuk digabungkan. Penelitian ini menggunakan periode tahun 2015 sampai pada tahun 2018 penggunaan tahun ini juga dapat menjadi pembaharuan dari penelitian mengenai IPM di NTT sehingga dapat menjadi keistimewaan pada penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori Utama (*Grand Theory*)

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kemajuan dibidang ekonomi adalah salah satu indikator penting dalam suatu proses pembangunan tapi unsur tersebut bukan hanya satu-satunya indikator yang dapat mendorong kemajuan suatu perekonomian. Pembangunan manusia juga harus menjadi bagian yang paling berharga dari adanya pembangunan yang biasanya hanya dilihat dari segi ekonomi dan material semata. Oleh sebab itu suatu pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multi-dimensi (Todaro, 1994:15).

Konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis dan juga diteliti dari sudut pandang manusianya, tidak hanya dari pertumbuhan ekonominya saja. Karena itu, pembangunan manusia yang dijalankan tidak hanya untuk meningkatkan *income* penduduk namun juga lebih mengarahkan pada tercapainya produktivitas yang tinggi diikuti pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan. Berdasarkan konsep tersebut maka untuk menjamin tercapainya suatu tujuan pembangunan manusia, terdapat 4 komponen pokok yang perlu diperhatikan (UNDP, 1995:103), yaitu :

a. Produktivitas (*Productivity*)

Masyarakat harus mampu untuk meningkatkan produktivitas mereka dan berpartisipasi secara utuh dalam proses mencari pendapatan dan lapangan

pekerjaan. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan manusia.

b. Pemerataan (*Equity*)

Masyarakat harus memiliki akses untuk mendapatkan kesempatan yang adil. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapuskan, jadi masyarakat dapat berpartisipasi di dalam dan memperoleh manfaat dari peluang-peluang yang ada.

c. Kestinambungan (*Sustainability*)

Akses untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan bahwa tidak hanya untuk generasi saat ini tapi juga untuk generasi masa datang. Semua jenis permodalan baik itu fisik, manusia dan lingkungan harus lebih lengkap lagi.

d. Pemberdayaan (*Empowerment*)

Pembangunan seharusnya dilakukan oleh masyarakat, dan bukan hanya untuk mereka saja. Namun, masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan dan berbagai proses yang dapat memberikan pengaruh terhadap kehidupan mereka.

Menurut konsep pembangunan manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0,0 – 100,0 dengan kategori sebagai berikut :

- a. Tinggi : IPM lebih dari 80,0
- b. Menengah Atas : IPM antara 66,0 – 79,9
- c. Menengah Bawah : IPM antara 50,0 – 65,9
- d. Rendah : IPM kurang dari 50,0

2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Model pertumbuhan ekonomi menurut Rostow menekankan bahwa pembangunan ekonomi di mana pun merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat maju. Model ini menjelaskan proses pembangunan terdiri dari 5 tahapan, yaitu : masyarakat tradisional, prakondisi untuk lepas landas, lepas landas, menuju kedewasaan, dan era konsumsi massal tinggi. Kriteria yang membedakan antara tahapan satu dengan tahapan yang lainnya adalah perubahan yang terjadi dalam kondisi ekonomi, sosial, politik, serta budaya dalam sebuah perekonomian (2008:24). Pertumbuhan ekonomi atau perubahan tahapan masyarakat menurut Rostow akan membantu dalam kenaikan pertumbuhan ekonomi dan juga peningkatan kesejahteraan.

Pembangunan ekonomi jangka panjang dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Nasional Bruto (PNB) atau pendapatan Nasional akan membawa perubahan mendasar dalam struktur ekonomi, dari ekonomi tradisional dengan pertanian sebagai sektor utama ke ekonomi modern yang didominasi oleh sektor-sektor non-primer, khususnya industri manufaktur sebagai motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi (Weiss, 1988).

2.1.3 Penduduk

Menurut BPS (Badan Pusat Statistika) penduduk adalah semua orang yang tinggal di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau bahkan lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

Struktur penduduk setiap harinya selalu berubah, ini disebabkan karena proses demografi yang meliputi kelahiran, kematian dan migrasi penduduk. Masalah kependudukan seringkali sangat mempengaruhi kesejahteraan dan perkembangan suatu daerah atau wilayah. Masalah kependudukan di Indonesia dikategorikan sebagai suatu masalah Nasional yang sudah besar dan memerlukan solusi untuk mengurangi masalah tersebut. Masalah kependudukan yang terjadi di Indonesia adalah jumlah penduduk yang tinggi sehingga seringkali banyaknya jumlah penduduk ini menjadikan masalah-masalah lainnya. Karena jumlah penduduk yang tinggi dan akibat yang ditimbulkan dapat menyebabkan kesejahteraan masyarakat menurun.

Kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah, Ukuran yang digunakan biasanya menggunakan jumlah penduduk setiap satu Km² atau setiap 1 mil². Kepadatan penduduk dapat mempengaruhi kualitas hidup penduduknya, pada daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi, usaha peningkatan kualitas hidup penduduk juga akan lebih susah untuk dilakukan. Hal ini menimbulkan permasalahan sosial ekonomi, kesejahteraan, keamanan, ketersediaan lahan, air bersih dan kebutuhan pangan (Mantra, 2007).

2.1.4 Pendidikan

Menurut Pratama dan Mandala (2008:242) melalui tingkat pendidikan, kesehatan dan gizi, kebebasan memilih pekerjaan dan jaminan masa depan yang lebih baik dapat meningkatkan kesejahteraan. Pandangan masyarakat umum, suatu keluarga dikatakan sejahtera ketika mereka mampu untuk menyekolahkan anggota keluarganya setinggi mungkin. Sama halnya jika semakin tinggi tingkat

pendidikan seseorang maka akan membawa keluarganya kepada kesejahteraan yang semakin tinggi.

Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2003 bahwa pendidikan adalah usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan untuk dirinya, masyarakat bangsa, dan negara. Menurut Ki Hajar Dewantoro pendidikan adalah tuntutan didalam tumbuhnya anak-anak, maksudnya adalah pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, sehingga mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan pengajaran, atau latihan bagi perannya di masa yang akan datang.

2.1.5 Upah Pekerja

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan, upah diartikan sebagai hak pekerja yang harus diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari para pemberi pekerjaan kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja termasuk didalamnya tunjangan bagi para pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan. Selain itu, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan pasal 1 ayat 1, upah dikatakan sebagai imbalan dari para pengusaha kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan

menurut suatu perjanjian kerja, termasuk didalamnya tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas pekerjaan yang telah dilakukan. Menurut Hartanto, *et al* (2016) upah merupakan imbalan yang diterima oleh pekerja dari para pemberi kerja atas jasa yang telah diberikan untuk perusahaan berdasarkan lamanya jam kerja dan jumlah produk yang dihasilkan, serta adanya kesepakatan antara para pekerja dan pemberi kerja dalam menentukan besarnya upah yang harus diterima dan diberikan.

2.2 Kajian Variabel Penelitian

2.2.1 Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Modal manusia merupakan salah satu faktor penting dalam perekonomian suatu daerah, semakin baik kualitas pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dan semakin meningkat nilainya maka diyakini kualitas manusia juga akan baik. Peningkatan perekonomian dalam bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan serta kemajuan disektor perekonomian di suatu daerah dapat meningkatkan nilai IPM. Karena pembangunan manusia juga dapat disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi (Iskandar, 2017).

Peningkatan perekonomian di suatu daerah akan meningkatkan besaran IPM. Peningkatan pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa ada peningkatan terhadap IPM (Arisman, 2018).

2.2.2 Pengaruh Kepadatan Penduduk Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Kepadatan penduduk mendorong terjadinya peningkatan IPM jika ditinjau berdasarkan kondisi wilayah dan aksesabilitas yang cukup baik. Penduduk yang padat dapat mengakibatkan terkonsentrasinya kegiatan-kegiatan ekonomi dan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat jadi lebih efisien (Mohammad, *et al*, 2017).

Bertambahnya jumlah penduduk maka Sumber Daya Manusia (SDM) akan bertambah yang dimaksudkan bahwa modal atau kekuatan dalam pembangunan suatu daerah atau wilayah akan bertambah pula (Suandi, *et al*, 2014). Sehingga pertumbuhan jumlah penduduk seringkali, dianggap sebagai suatu faktor pendorong perekonomian negara, namun perekonomian negara akan dapat maju apabila Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki mempunyai kualitas yang baik.

2.2.3 Pengaruh Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting bagi pengembangan sumberdaya manusia yang tersedia. Bagi negara berkembang, pendidikan dasar menjadi prioritas utama untuk mengembangkan sumber daya manusia sejak dini (Todaro, 2003:404).

Semakin besar pengeluaran rumah tangga pada bidang pendidikan dan semakin tinggi tingkat penduduk merupakan indikasi terhadap peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat dan IPM akan meningkat (Sulistiyowati, *et al*, 2017). Variabel pendidikan menjadi penting mengingat penambahan sarana

pendidikan dan penyediaan layanan pendidikan yang layak terhadap masyarakat dapat meningkatkan tingkat partisipasi pendidikan masyarakat dan dapat meningkatkan IPM (Mohammad, *et al*, 2017).

2.2.4 Pengaruh Upah Minimum Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Manusia hidup memerlukan kerja, karena dengan bekerja manusia akan memperoleh upah, gaji ini dapat digunakan untuk mencukupi segala kebutuhan hidup yang sangat banyak macamnya (Anogoro, *et al*, 1993). Penjelasan tersebut diketahui, bahwa pekerja akan memiliki kemampuan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri dan akan memperoleh kepuasannya ketika bisa memenuhi semua itu, kepuasan ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan seseorang karena berhasil memenuhi kebutuhan hidupnya.

Perkembangan UMR setiap tahunnya akan memberikan dampak pada peningkatan pendapatan. Keadaan itulah yang akan berakibat pada kemampuan buruh untuk meningkatkan pembelanjannya, nantinya terjadi peningkatan ekonomi, sehingga dapat dikatakan bahwa perkembangan UMR dapat berefek pada IPM (Zainuddin, 2017).

2.3 Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul	Metode Analisis dan Variabel	Hasil Penelitian
1	Nur Feriyanto, <i>The effect of employment, economic growth, and investment on HDI: In provinces in Indonesia</i> (2016)	Metode analisis yang digunakan adalah <i>Pooled Data Regression</i> . Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah : Y : Indeks Pembangunan	1. jumlah tenaga kerja memiliki dampak positif dan signifikan terhadap IPM di Indonesia 2. laju pertumbuhan ekonomi tidak memiliki

		<p>Manusia (IPM)</p> <p>X1: Jumlah Tenaga kerja</p> <p>X2 : Laju Pertumbuhan Ekonomi</p> <p>X3 : Investasi langsung Asing</p> <p>X4 : Investasi domestik</p>	<p>pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia.</p> <p>Sementara</p> <p>3. Investasi langsung asing dan investasi domestik secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan.</p>
2	<p>Irham Iskandar, <i>Effect of Human Development Index Fund on Economic Growth Through a Special Autonomy</i> (2017)</p>	<p>Metode analisis yang digunakan adalah <i>pooled data</i> atau data panel.</p> <p>Menggunakan data dari 23 kabupaten/kota di Aceh.</p> <p>Pada penelitian ini peneliti menggunakan variabel yaitu:</p> <p>Y : Indeks Pembangunan Manusia,</p> <p>X1 : Dana Alokasi Khusus</p> <p>X2 : Laju Pertumbuhan Ekonomi</p>	<p>1. Moderasi antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui dana alokasi khusus berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.</p>
3	<p>Anisa Fadilah, Candra Fajri Ananda, David Kaluge, <i>A Panel Approach: How Does Government Expenditure Influence Human Development Index?</i> (2018)</p>	<p>Metode analisis data yaitu data panel. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah :</p> <p>Y: Indeks Pembangunan Manusia,</p> <p>X1 : Pengeluaran pemerintah dibidang</p>	<p>1. Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi memiliki pengaruh signifikan positif pada indeks pembangunan manusia.</p> <p>2. Pengeluaran</p>

		<p>pendidikan,</p> <p>X2 : Pengeluaran pemerintah dibidang kesehatan,</p> <p>X3: Pengeluaran pemerintah dibidang ekonomi,</p> <p>X4 : Pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur</p>	<p>pemerintah untuk infrastruktur memiliki pengaruh signifikan terhadap indeks pendidikan dan</p> <p>3. Indeks pendapatan, tidak secara signifikan mempengaruhi IPM</p>
4	<p>Arisman, <i>Determinant of Human Development Index in ASEAN Countries</i> (2018)</p>	<p>Analisis regresi data panel dengan menggunakan model <i>fixed effect</i>.</p> <p>Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah :</p> <p>Y: Indeks Pembangunan Manusia,</p> <p>X1 : Tingkat Inflasi</p> <p>X2 : Tingkat Pengangguran</p>	<p>1. Tingkat pertumbuhan populasi dan pendapatan per kapita mempengaruhi indeks pembangunan manusia di negara-negara anggota ASEAN,</p> <p>2. Tingkat inflasi dan tingkat pengangguran tidak berdampak pada IPM</p>
5	<p>Niken Sulistyowati, Bonar Marulitua Sinaga, Novindra, <i>Impacts of Government and Household Expenditure on Human Development Index</i> (2017)</p>	<p>Metode estimasi menggunakan <i>Two Stage Least Squares</i> dengan prosedur SYSLIN. Simulasi prediksi menggunakan metode <i>Autoregressive</i> bertahap. Simulasi model menggunakan metode Newton dan prosedur SIMNLIN.</p>	<p>1. Kombinasi peningkatan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan infrastruktur menyebabkan kinerja yang lebih baik dalam meningkatkan pendapatan per kapita.</p>

6	Zainuddin, Analisis Dampak Inflasi, PDRB dan Perkembangan Upah Minimum Regional Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Masyarakat di Provinsi Aceh (2015)	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linier berganda (OLS). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Y : IPM X1 : Inflasi, X2 : PDRB dan X3 : UMR	1. inflasi, PDRB dan UMR baik secara bersama-sama maupun secara parsial memiliki pengaruh terhadap IPM di Provinsi Aceh.
7	Nur Baeti, Analisis Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah terhadap IPM kabupaten/kota Jawa Tengah tahun 2007-2011 (2013)	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel model efek tetap (FEM) dengan metode <i>Generalized Least Square</i> (GLS). Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan variabel : X1 : Jumlah pengangguran, X2 : Pertumbuhan ekonomi, dan X3 : Alokasi pengeluaran pemerintah	1. Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah baik secara persial maupun bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap IPM.
8	Nursiah Chalid dan Yusbar Yusuf, Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif terhadap data-data sekunder. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Y : IPM	1. Tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, upah minimum dan laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap IPM.

	Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia d Provinsi Riau (2014).	X1 : Tingkat kemiskinan X2 : Tingkat Pengangguran X3 : Upah minimum X4 : Laju pertumbuhan ekonomi	
9	Risma Junian, Dadan Kusnandar dan Evy Sulistianingsih, Analisis Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Barat dengan Regresi Panel dan Biplot (2018).	Metode analisis pada penelitian ini adalah regresi dengan menggunakan data panel. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah : Y : Indeks Pembangunan Manusia X1 : Tingkat penduduk miskin X2 : Kepadatan penduduk X3 : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	1. Kepadatan penduduk, tingkat penduduk miskin dan tingkat partisipasi angkatan kerja memiliki pengaruh secara signifikan terhadap IPM.
10	Novita Dewi, Pengaruh Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau, (2017)	Metode analisis data <i>quantitative</i> . Metode yang digunakan ialah regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS. Dengan Variabelnya yaitu: Y : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) X1 : Kemiskinan X2 : Pertumbuhan Ekonomi.	1. Kemiskinan berpengaruh dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 2. Pertumbuhan ekonomi tidak ditemukan pengaruhnya terhadap IPM di Provinsi Riau.
11	Zulfikar Mohammad Yamin Latuconsina,	Teknik analisis yang digunakan pada penelitian	1. Aspek yang berpengaruh terhadap

	<p>Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malang Berbasis Pendekatan Perwilayahan dan Regresi Panel, (2017)</p>	<p>ini adalah analisis regresi panel data. Lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Periode waktu yang digunakan pada penelitian ini adalah dari tahun 2010 hingga tahun 2014.</p> <p>Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah:</p> <p>Y : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</p> <p>X : Kepadatan penduduk, rasio rumah tangga pra sejahtera per penduduk, jumlah dokter, perawat-bidan dan tenaga kesehatan, jumlah fasilitas kesehatan dan pendidikan, jumlah guru dan murid, rasio guru per siswa, rasio sekolah per siswa dan rasio perawat-bidan per puskesmas.</p>	<p>IPM pada tipologi I adalah aspek kependudukan dan kesehatan yang meliputi jumlah penduduk, sarana kesehatan dan tenaga kesehatan.</p> <p>2. tipologi II adalah, aspek kependudukan dan pendidikan,</p> <p>3. Tipologi III adalah aspek kesehatan yaitu, jumlah rumah sakit.</p>
12	<p>Dwi Heriyanto, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten atau Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2006-2010</p>	<p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah persamaan linier berganda (OLS) dengan menggunakan variabel yaitu :</p> <p>Y : Indeks Pembangunan Manusia</p>	<p>1. Seluruh variabel pada penelitian ini memiliki pengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).</p>

	(2015).	<p>X1 : PDRB</p> <p>X2 : Anggaran pembangunan sosial</p> <p>X3 : Jumlah penduduk miskin</p> <p>X4 : Sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan.</p>	
13	<p>Nursiah Chalid, dan Yusbar Yusuf, Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau, (2014)</p>	<p>Analisis data menggunakan regresi linear berganda. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah :</p> <p>Y : IPM</p> <p>X1 : Tingkat kemiskinan</p> <p>X2 : Tingkat pengangguran</p> <p>X3 : Upah minimum</p> <p>X4 : Laju pertumbuhan ekonomi.</p>	<p>1. tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, upah minimum dan laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap IPM.</p>
14	<p>Tutik Yuliani, Novitan Saragih, Determinan Pembangunan Manusia di Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah, (2014)</p>	<p>Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan metode GLS (<i>Generalized Least Square</i>).</p> <p>Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah :</p> <p>Y : Indeks Pembangunan Manusia</p> <p>X1 : Jumlah pengangguran</p> <p>X2 : Pertumbuhan ekonomi</p> <p>X3 : Pengeluaran</p>	<p>1. Pengangguran memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM),</p> <p>2. Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).</p>

		pemerintah.	3. Pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
15	Ebru Çağlayan-Akay M. Hanifi Van, Determinants of the Levels of Development Based on the Human Development Index : Beysian Ordered Probit Model (2017)	Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bayesian panel ordered probit model. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Y : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) X : Populasi pedesaan, pengeluaran kesehatan, PDB, pengguna internet, harapan hidup saat lahir dan APM	1. Populasi di pedesaan, pengeluaran untuk kesehatan, PDB, jumlah pengguna internet, harapan hidup saat lahir dan APM memiliki pengaruh positif pada IPM.

Berdasarkan penelitian terdahulu, berikut ini merupakan persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis :

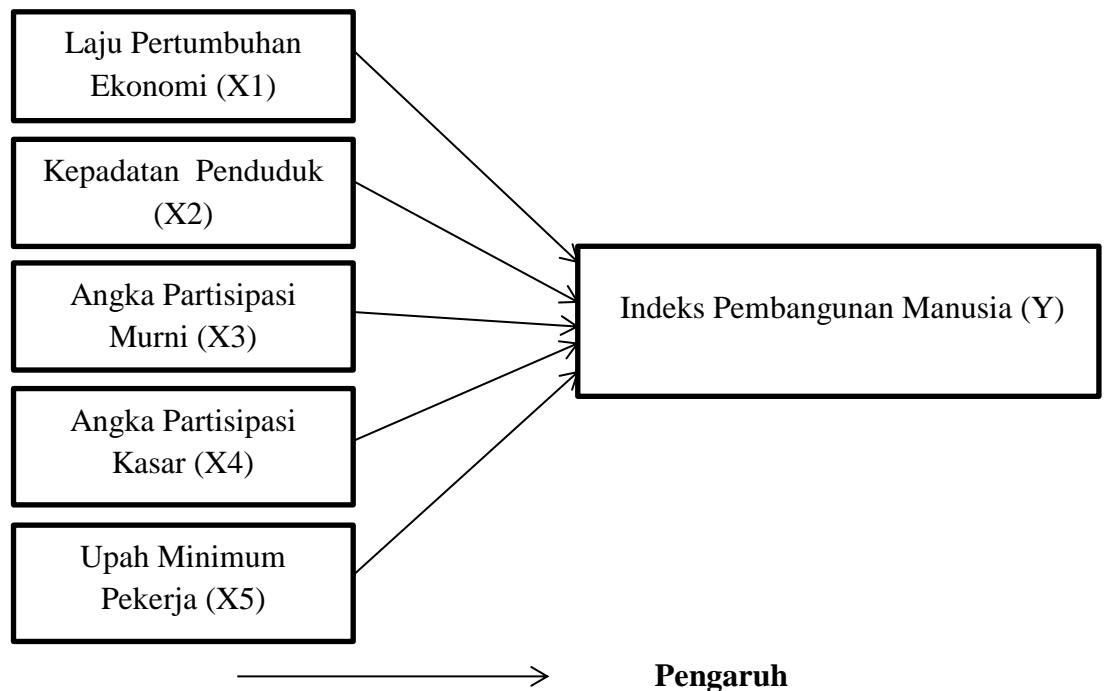
1. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah bahwa seluruh kajian penelitian terdahulu yang diungkapkan oleh peneliti seluruhnya menggunakan variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel Y. Penelitian ini juga menunjukkan persamaan pada penelitian yang dilakukan oleh Nur Feriyanto, Irham Iskandar, Zainuddin, Nursiah Chalid, dkk, Risma Junian, dkk, Zulfikar Mohammad, dkk dan penelitian yang

dilakukan oleh Ebru Çağlayan-Akay persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah penggunaan variabel dependen baik itu laju pertumbuhan ekonomi, kepadatan penduduk, angka partisipasi murni, angka partisipasi kasar dan upah minimum.

2. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada penggunaan variabel dependen atau variabel X yang digunakan pada penelitian terdahulu, penelitian ini hanya menggunakan variabel X yaitu laju pertumbuhan ekonomi, kepadatan penduduk, angka partisipasi murni, angka partisipasi kasar dan upah minimum.

2.4 Kerangka Berpikir

Peningkatan kualitas hidup masyarakat atau kesejahteraan merupakan tanggung jawab semua pihak bukan hanya pemerintah saja. Keberhasilan masyarakat dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan juga sumber daya yang tersedia dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat meningkat pula. Karena itulah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan IPM di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kerangka berpikir pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:



Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka berpikir diatas menjelaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu proxy untuk mengukur keberhasilan dalam upaya pembangunan manusia atau dengan kata lain untuk melihat kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini akan fokus untuk menemukan determinan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten atau Kota Provinsi NTT tahun 2015 – 2018. Faktor-faktor yang diduga memiliki pengaruh pada kesejahteraan masyarakat adalah laju pertumbuhan ekonomi, kepadatan penduduk, angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni dan upah minimum pekerja.

2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₁: Diduga laju pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

H₂: Diduga kepadatan penduduk memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

H₃: Diduga Angka Partisipasi Murni (APM) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

H₄: Diduga Angka Partisipasi Kasar (APK) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

H₅: Diduga upah minimum memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah didapatkan pada penelitian terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten atau Kota Provinsi NTT pada periode tahun 2015-2018 menggunakan regresi data panel dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Laju pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
2. Kepadatan penduduk memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
3. Angka Partisipasi Murni (APM) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
4. Angka Partisipasi Kasar (APK) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
5. Upah minimum memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dan kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa saran yang diajukan oleh penulis guna mendukung upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten atau Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yaitu :

1. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat harus bersama-sama membantu mengatasi kemiskinan dan pemerataan di Kabupaten atau Kota Provinsi NTT dengan cara memberikan bantuan kepada golongan masyarakat menengah ke bawah dan menyediakan pekerjaan yang layak sehingga pemerataan dapat terjadi dan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten atau Kota Provinsi NTT dapat meningkat secara berkualitas.
2. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat harus bersama-sama membantu mengatasi ketidak merataan kepadatan penduduk di Kabupaten atau Kota Provinsi NTT, dengan cara membantu mendorong pertumbuhan jumlah penduduk, sehingga terjadi pemerataan kepadatan penduduk dan dapat meningkatkan sektor perekonomian di Provinsi NTT.
3. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat harus bersama-sama membantu untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten atau Kota Provinsi NTT, dengan cara memperbaiki sarana dan prasarana, memberikan akses yang layak bagi anak usia sekolah, sehingga ada lebih banyak lagi anak usia sekolah yang dapat masuk jenjang pendidikan dengan tepat sesuai dengan usianya dan juga diharapkan tidak ada lagi anak putus sekolah di Kabupaten atau Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
4. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat harus bersama-sama membantu meningkatkan kualitas hidup para pekerja di Kabupaten atau Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan cara meningkatkan jumlah upah minimum bagi para pekerja setiap tahunnya, dan meningkatkan pengawasan disetiap

perusahaan agar tidak ada lagi perusahaan yang tidak membayarkan upah sesuai dengan upah minimum regional.

Daftar Pustaka

- (BPS), B. P. (t.thn.). Dipetik Desember 21, 2019, dari <http://www.bps.go.id>
- Agus Tri and Prawoto, N. B. (2016). *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis : Dilengkapi Aplikasi SPSS & E-Views* . Depok : PT. Rajagrafindo Persada.
- Anisa Fadilah, C. F. (2018). A Panel Approach : How Does Government Expenditure Influence Human Development Index? *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 10 (2), 2018, 130-139.
- Ariefianto, M. D. (2012). *Ekonometrika Esensi dan Aplikasi dengan Menggunakan E-Views* . Jakarta: Erlangga .
- Arisman. (2018). Determinant of Human Development Index in ASEAN Countries. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 7 (1), 2018 , 113-122.
- Case, K. E. (2004). Prinsip-Prinsip Ekonomi Makro, alih bahasa. Dalam B. Muhamad (Penyunt.). Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- Dewi, N. (2017). Pengaruh Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau. *JOM FEKON*, Vol. 4 No. 1 , 870-882.
- Feriyanto, N. (2016). The Effect of Employment, Economic Growth and Investment on HDI : In Provinces in Indonesia. *Journal of Economics, Business and Accountancy Ventura*, 19 (1), 2016, 1-12.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikai Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi* . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N. (2006). *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga.
- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* . Bogor: Ghalia Indonesia.
- Heriyanto, D. (2015). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten atau Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2006 - 2010. *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)*, 3 (1), 2015, 1-18.
- Iskandar, I. (2017). Effect of Human Development Index Fund on Economic Growth Through a Special Autonomy. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* , 18 (1), 2017, 40-49.
- Kartasapoetra, G. (1998). *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Latuconsina, Z. M. (2017). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malang Berbasis Pendekatan Perwilayahan dan Regresi Panel. *Journal of Regional Development Planning*, 202-216.
- Mantra, B. I. (2007). *Demografi Umum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Manurung, P. R. (2008). *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikro Ekonomi dan Makro Ekonomi)*. Jakarta: LP FE-UI.
- Niken Sulistyowati, B. M. (2017). Impacts of Government and Household Expenditure on Human Development Index. *Journal of Economics and Policy*, 10 (2) (2017), 412-428.
- Prasetyo, E. (2008). The Quality of Growth : Peran Teknologi Human Capital Sebagai Pemacu Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas. *JEJAK*, 1 (1), 2009.
- Ranis, G. (2004). Human Development and Economic Growth. Center Discussion Paper No. 887.
- Risma Junian, D. K. (2018). Analisis Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Barat dengan Regresi Panel dan Biplot. *Buletin Ilmiah Math Stat. dan Terapannya (Bimaster)*, 07 (03), 2018, 177-184.
- Rochaida, E. (2016). Dampak Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Keluarga Sejahtera di Provinsi Kalimantan Timur. *Forum Ekonomi*, 18 (1), 2016, 14-24.
- Saragih, T. Y. (2014). Determinan Pembangunan Manusia di Kabupaten atau Kota Provinsi Jawa Tengah. *Journal of Economics and Policy*, 7 (1), 2014, 60-72.
- Setiawan, D. H. (2016). Pengaruh Insentif dan Punishment Pada Kinerja Karyawan PT. Calvary Abadi Dry Concrete. *AGORA*, 4 (1), 2016, 503-510.
- Smith, T. P. (2004). *Economic Development* (Eight Edition ed.).
- Stewart, A. G. (1998). *Economic Growth and Human Capital* . QEH Working Paper No. 18.
- Suharto, E. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Sujarweni, W. (2015). *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi* . Yogyakarta: Pustakabarupress.
- Todaro, M. P. (1994). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.

- Todaro, M. P. (1998). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (Edisi Keenam ed.). Jakarta: Erlangga.
- UNDP. (1997). *Human Development Report* . Oxford University Press.
- Van, E. Ç.-A. (2017). Determinants of the Levels of Development Based on the Human Development Index : Bayesian Ordered Probit Model . *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7 (5), 2017, 425-431.
- Weiss, J. (1988). *Industry in Developing Countries : Theory, Policy and Evidence*. Routledge.
- Widiyanti, A. P. (1993). *Psikologi dalam Perusahaan* . Jakarta: Rineka Cipta.
- Yusuf, N. C. (2014). Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten atau Kota dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi*, 22 (2), 2014, 1-12.
- zainuddin. (2015). Analisis Dampak Inflasi, PDRB dan Perkembangan Upah Minimum Regional Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Masyarakat di Provinsi Aceh . *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, 1 (1), 2015, 45-52.